

PERAN UNIT KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELINDUNGAN PEKERJA DARI PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

Qurrotul Nguyun*
Susilo Andi Dharma, S.H., M.Hum.**

INTISARI

Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan diskriminasi di dunia kerja yang memerlukan upaya pencegahan dan penyelesaian. Penelitian ini mencoba menggambarkan pelecehan seksual yang dialami oleh pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta dampak yang dirasakan oleh pekerja. Selain itu penelitian ini juga menggali penyelesaian yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha maupun pengawas ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi yang mengatur mengenai pelecehan seksual di tempat kerja dan peran unit kerja pengawas ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya melindungi pekerja dari pelecehan seksual di tempat kerja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang yang ditafsirkan secara sistematis dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian ini terdiri data primer yang berupa hasil wawancara dari narasumber dan responden serta data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menyusun dan menganalisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Peran Unit Kerja Pengawas ketenagakerjaan DIY dalam melindungi pekerja dari pelecehan seksual di tempat kerja berjalan baru dalam tahap pembinaan namun terkesan belum ada upaya yang serius dalam pelaksanaannya. Koordinasi antara Unit Kerja Pengawas ketenagakerjaan DIY dengan perusahaan dalam upaya melindungi pekerja dari pelecehan seksual juga masih minim. Penulis menemukan setidaknya tiga solusi untuk melindungi pekerja dari pelecehan seksual di tempat kerja yaitu membuat dan mengesahkan peraturan mengenai kekerasan seksual; mengadakan pengawas ketenagakerjaan khusus/spesialis; dan mengupayakan pencegahan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual secara tripartit.

Kata kunci: pelecehan seksual, pengawasan ketenagakerjaan, pelindungan pekerja

* Jalan Kaliurang KM 12,5 Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

** Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281.

THE ROLE OF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LABOUR INSPECTOR ON PROTECTING WORKERS FROM SEXUAL HARASSMENT IN WORKPLACE

*Qurrotul Nguyun**

*Susilo Andi Dharma, S.H., M.Hum.***

ABSTRACT

Sexual harassment in the workplace is discrimination in the workfield that requires prevention and resolution efforts. This research tries to describe and identify the sexual harassment experienced by workers in the Special Region of Yogyakarta and the impact for the workers. In addition, this research also explores the solutions from workers, employers and especially from labor inspectors. This research aims to find out and analyze the laws and regulations of sexual harassment in the workplace and the role of Daerah Istimewa Yogyakarta Labor Inspector on protecting workers from sexual harassment in the workplace.

This research is normative-empirical research that using interpreted statutory approach and conceptual approach. The material in this research consists of primary data which is interviews from experts and respondents, while the secondary data obtained from literature studies. The method used in compiling and analyzing data in this research is a qualitative approach.

The role of Daerah Istimewa Yogyakarta Labour Inspection on protecting workers from sexual harassment in the workplace has been running through development activity, it seems there has been no serious effort in its implementation. The coordination between Daerah Istimewa Yogyakarta Labour Inspection and companies as an effort to protect workers from sexual harassment in the workplace still low and needs to be optimized. The author found there are at least 3 (three) solutions to protect the workers from sexual harassment in the workplace including, to ratify and legalizing laws and regulations regarding to sexual harassment; to establish specialist labour inspectors; and make tripartite prevention and resolution of sexual harassment cases.

Keywords: sexual harassment, labour inspection, worker protection